

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Yusri¹, Cut Delsie Hasrina*¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Lampoh Keude Aceh Besar

*Email korespondensi: cut.hasrina@yahoo.com

Diterima 7 September 2019; Disetujui 30 Oktober 2019; Dipublikasi 31 Oktober 2019

Abstract: *Analysis of financial ratios to Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is one of the parameters in measuring the performance of regional financial management. Financial performance analysis uses the calculation of the ratio of effectiveness, efficiency and independence of regional finances. This research aims to measure the financial performance of Banda Aceh City Local Government during the fiscal year of 2014 to 2018. The research type is descriptive using the ratio analysis method. The results showed that the effectiveness ratio was categorized as effective against the APBD, and the efficiency ratio was categorized as less efficient towards the APBD. The independence ratio of regional financial management is still low.*

Keywords: *Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Financial Independence Ratio, Budget, Expenditures*

Abstrak: Analisis rasio keuangan terhadap Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu parameter dalam mengukur kinerja manajemen keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh selama tahun fiskal 2014 hingga 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dikategorikan efektif terhadap APBD, dan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien terhadap APBD. Rasio independensi manajemen keuangan daerah masih rendah.

Kata kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan, Anggaran, Pengeluaran

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga harus mampu

meningkatkan pemerataan dan keadilan, dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian

Analisa Rasio Efektifitas....

(Yusri & Hasrina, 2019)

pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik (Juddy Julian Pilat, 2017).

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan daerah adalah untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tidak hanya dinilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun juga dilihat bagaimana pengalokasian dana tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan APBD diatur dalam suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah (Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, 2010)

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban (Arjuli, Hasrina, & Yusri, 2019). Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka yang ada dalam komponen pada laporan keuangan, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka dalam satu periode atau beberapa

periode (Agustin, Darminto, & Handayani, 2013). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh analisa rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap APBD pemerintah kota Banda Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran Pemerintah

Proses anggaran pemerintah daerah secara substansi telah berubah sejak awal Tahun 1990-an (Kelly, Rivenbark, & C., 2008). Hal itu antara lain disebabkan oleh peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja dan ketersediaan teknologi informasi. Dalam pendekatan rasionalistik, penganggaran harus mencakup perencanaan penyediaan layanan yang di dalamnya terdapat penetapan target layanan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya. Beberapa menekankan perencanaan (*planning – programming – budgeting - systems*), tingkat layanan (*zero-based budgeting*) dan penyelarasan sumber daya dengan tujuan (*management-by-objectives*).

Pengamat yang ahli tentang penganggaran pemerintah daerah menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal yang mengubah lingkungan penganggaran. Pertama, penelitian yang menyimpulkan bahwa hasil pengeluaran non-incremental terbukti pada tingkat fungsional sejak awal 1990-an. Kedua, teori normatif telah menekankan penganggaran kinerja atau reformasi anggaran lainnya yang

didorong oleh akuntabilitas selama periode waktu yang sama. Ketiga, teori deskriptif menyarankan bahwa sistem penganggaran daerah sedang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk mengarahkan sumber daya secara strategis sesuai dengan prioritasnya. Teknologi merupakan faktor yang menentukan dalam perubahan proses, tetapi begitu juga penekanan penting terdapat pada akuntabilitas kinerja

Rasio Efektivitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah berkenaan dengan merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi, semakin baik. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, (Susanto, 2014)

Rasio Efisiensi

Rasio ini menjelaskan tentang perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang

diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, (Susanto, 2014)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya: bantuan pemerintah pusat/provinsi maupun dari pinjaman daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (pemerintah pusat/provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat

dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, (Susanto, 2014)

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung guna memperoleh data-data maupun informasi yang mendukung pemecahan masalah penelitian.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh, menggunakan data sekunder yakni Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019).

c. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan.

1. Rasio Efektivitas

Penghitungan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan}}$$

2. Rasio Efisiensi

Perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran atau belanja dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya/belanja keluar} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

3. Rasio Kemandirian

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah dirumuskan menggunakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dikali seratus persen.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD

Tahun Anggaran 2014 sampai 2018.

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menjelaskan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam penggunaan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang

telah dicapai. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus persen. Perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh TA 2014 s.d. 2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Persentase (%)
2014	171.777.275.448,97	155.974.033.924,00	110,13
2015	209.914.107.300,96	196.500.996.271,00	106,83
2016	258.591.409.669,00	233.904.889.113,00	110,55
2017	270.170.805.366,08	280.877.031.733,00	96,19
2018	246.272.150.484,71	271.470.773.450,00	90,72
Rata-rata	231.345.149.653,94	227.745.544.898,20	101,58

Sumber: Data Diolah dari LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Tabel 4 menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Pemerintah Kota Banda Aceh yang cukup baik, dengan melihat hasil rata-rata sebesar 101,58% selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 110,13% , hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD lebih besar dari target penerimaan PAD yang ditetapkan. Tahun 2015 rasio efektivitas menurun menjadi 106,83% namun realisasi penerimaan PAD tetap mampu melampaui dari target penerimaan yang ditetapkan.

Tahun 2016, rasio efektivitas menjadi 110,55% berarti realisasi penerimaan lebih besar dari target yang ditetapkan. Namun, pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 rasio ini menurun menjadi 96,19% dan 90,72%, hal ini menunjukkan realisasi penerimaan PAD lebih kecil dari target penerimaan yang telah

ditetapkan. Walaupun hasil rata-rata rasio efektivitas yang diperoleh menunjukkan kategori yang baik, namun ada penurunan realisasi penerimaan. Hal tersebut harus dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada upaya optimalisasi pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan dibandingkan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik. Perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh TA 2014 sampai 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2014	1.083.686.166.704,00	1.134.104.242.953,97	95,55
2015	1.154.827.388.812,07	1.217.566.428.915,33	94,85
2016	1.234.759.979.058,68	1.321.704.923.080,05	93,42
2017	1.089.345.543.758,54	1.244.415.059.118,86	87,54
2018	1.046.500.852.724,67	1.135.914.599.521,72	92,13
Rata-rata	1.121.823.986.211,59	1.210.741.050.717,99	92,66

Sumber: Data Diolah dari LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan kurang efisien dengan tingkat rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 92,66%. Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh cukup besar dan menyita hampir seluruh pendapatan daerah. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien.

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, jadi semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa kesejahteraan daerah juga tinggi. Dengan demikian tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah provinsi/Pusat akan semakin rendah. Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 6. Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banda Aceh TA 2014 sampai 2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Rp)	Persentase (%)
2014	171.777.275.448,97	811.552.695.026,00	21,17
2015	209.914.107.300,96	939.593.421.655,82	22,34
2016	258.591.409.669,00	1.013.266.260.678,05	25,52
2017	270.170.805.366,08	966.309.055.425,78	27,96
2018	246.272.150.484,71	861.791.849.037,18	28,58
Rata-rata	231.345.149.653,94	918.502.656.364,57	25,19

Sumber: Data Diolah dari LHP BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Banda Aceh (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh terletak pada tingkat rata-rata 25,19%, sehingga dikatakan kondisi ini berada pada kategori rendah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat. keadaan ini memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih cukup tinggi terhadap Pemerintah Provinsi/Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum cukup mampu mencukupi kebutuhan daerah sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 samapai 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan efektif karena persentase di atas 100%, yakni sebesar 101,58%. Tingkat persentase ini menggambarkan bahwa efektivitas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan sumber Pendapatan Asli Daerah Sangat Efektif berdasarkan Kriteria Penilaian Efektivitas.
- b. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan kurang efisien karena persentase rasio efisensi di bawah seratus,

yakni sebesar 92,66%. Persentase pencapaian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum efisien.

- c. Kemandirian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan masih rendah, dengan tingkat rata-rata 25,19%. Pemerintah Kota Banda Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang dapat diberikan pada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Mempertahankan tingkat efektivitas serta berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.
- b. Optimalisasi perolehan PAD melalui penggalan sumber-sumber baru penerimaan daerah kendati jumlah bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih cukup besar.
- c. Memperbesar alokasi Belanja Modal yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana ekonomi serta layanan publik agar dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. L., Darminto, & Handayani, S. R. (2013). *Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan perusahaan*. 2(1), 1–8.
- Arjuli, A., Hasrina, C. D., & Yusri, Y. (2019). Pengaruh Kebijakan Pertanggungjawaban Akuntansi Sektor Publik dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Pembangunan Fisik. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v3i1.238>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *laporan keuangan pemerintah aceh*.
- Juddy Julian Pilat, J. M. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Jurnal Accountability*, 06(1), 45–56.
- Kelly, J. M., Rivenbark, & C., W. (2008). Budget Theory in Local Government: The Process-Outcome Conundrum. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1–30). pp. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Susanto, H. (2014). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Repository.Ut.Ac.Id*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yusri, Y., & Hasrina, C. D. (2018). Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Kontrol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i2.62>